

**ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
(STUDI KASUS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN TAPIN)**

**Djoko Wibowo**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin  
Jl. Ahmad Yani Km. 5.5 Banjarmasin  
ojok.wibowo@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Jenis penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 40 orang. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, Uji F, dan uji T. Hasil pengolahan data diketahui sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

**Kata kunci:** *sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas informasi laporan keuangan*

## Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (propinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama. Menanggapi mandat tersebut maka dikeluarkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas.

*Good corporate governance* setidaknya ditandai dengan tiga prinsip utama yaitu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2012:20).

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan bisa dikatakan

andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (Mokoginta dkk, 2017). Adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Untary dan Ardiyanto, 2015). Berdasarkan temuan peneliti, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin telah dilakukan pengendalian intern, namun peneliti merasa perlu untuk mengetahui sejauh mana

pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan tersebut telah dilakukan dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Faktor kedua yang mempengaruhi mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wibawa dkk, 2017). Pemerintah daerah dengan bantuan alat yang mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak lainnya akan mampu menyusun laporan keuangan dengan lebih efisien dan lebih tepat waktu. Rahman (2015) juga menyatakan bahwa tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Berdasarkan temuan peneliti, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin ketersediaan perangkat teknologi informasi masih terbatas dimana setiap pegawai belum tentu memiliki komputer sendiri guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya (Hervesi, 2005 dalam Wati et al 2014).

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Berdasarkan temuan peneliti, Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin sebagian besar sumber daya manusia yang memproses informasi laporan keuangan berstatus pegawai kontrak dengan latar pendidikan dan kompetensi yang beragam, sehingga dirasa perlu bagi peneliti untuk mengetahui dampaknya terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- 2 Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- 3 Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- 4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

## **Studi Literatur**

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Hasibuan (2011;197) KepemiPerkembangan pengendalian intern di Indonesia ditandai dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. Sejalan dengan perkembangan, konsep pengendalian sebagai suatu proses bergeser dari hard factor ke soft factor. PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi pendekatan COSO dengan beberapa modifikasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan COSO ini karena suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan, tetapi menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien.

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan

pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara.

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat

dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor intern dan eksternal

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai

## 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu

memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri

## 5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Akadun (2009: 114) mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan, electronic commerce, dan jenis

lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000)

Menurut penelitian Hanoni (2016), pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi adalah perilaku sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Menurut Afrianti (2015),” Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.”

Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan (Akadun, 2009: 130). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010), bahkan komputer juga dapat mengerjakan pekerjaan yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh manusia. Pengolahan data menjadi sebuah informasi dengan menggunakan bantuan komputer akan lebih meningkatkan nilai dari sebuah informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi misalnya, informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disediakan dalam waktu yang cepat dan tepat. Pemrosesan data dapat dilaksanakan secara manual yang akan menghasilkan suatu informasi dengan waktu yang lebih lama daripada pemrosesan data dengan menggunakan komputer sehingga biaya yang dikeluarkan akan relatif lebih banyak.

Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan

akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007).

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dari kualitas dan kesempurnaan pengelolaan aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil, penyediaan anggaran untuk pemberdayaan, serta peralatan yang mendukungnya (Harsono, 2011).

Perencanaan sumber daya manusia terdiri dari kegiatan-kegiatan reaktif dan antisipatif melalui suatu organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut mempunyai jumlah dan macam orang pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memaksimalkan tujuantujuan pelayanan yang mana organisasi mempertinggi aktualisasi diri maupun kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan anggotanya serta memungkinkan pemanfaatan yang maksimal mengenai kecakapan-kecakapan maupun

bakat-bakat dari paraanggota (Sunyoto, 2012)

Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi produktivitas menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009) dalam Sunyoto (2012) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), kemampuan (abilities), sikap (attitude), maupun perilaku (behavior). Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik serta produktif. Keterampilan berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis. Kemampuan (abilities) tercipta dari sejumlah kompetensi yang dipunyai oleh seorang pegawai.

Tracey (2003) dalam bukunya yang berjudul *The Human Resources Glossary*, mengungkapkan istilah sumber daya manusia sebagai staf-staf yang mengoperasikan sebuah organisasi, yang berbeda dengan sumber daya keuangan dan peralatan dari suatu organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan fungsi organisasi yang berhubungan dengan orang-orang dan isu-isu yang berkaitan dengan orang-orang seperti kompensasi, perekrutan, manajemen kinerja, dan pelatihan.

### **Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan diperlukan dalam sebuah organisasi atau instansi karena laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) yaitu, Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Menurut Mardiasmo (Kepala BPKP), akuntabilitas keuangan Negara terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu: efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk bisa mencapai ke 4 (empat) pilar tersebut maka diperlukan adanya langkah-langkah yaitu dengan melaksanakan 5 (lima) pilar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Menurut Darise (2014:51) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2016; No. 1) tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk

membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian bermaksud menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia) terhadap variabel dependen (kualitas informasi laporan keuangan).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin sebanyak 40 orang. Hal ini dilakukan agar jawaban kuesioner dapat terjawab dengan baik pada subjek yang tepat dan berkompeten dibidangnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu: observasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Karakteristik responden penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) usia responden, (2) tingkat pendidikan, (3) masa kerja, (4) jenis kelamin, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase
18-28 tahun	6	15.0
29-39 tahun	14	35.0
40-55 tahun	10	25.0
>56 tahun	10	25.0
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel 1 diketahui, bahwa sebagian besar responden yang diteliti berusia lebih dari 29-39 tahun sebanyak 35%. Sedangkan usia 40-55 dan >56 tahun masing-masing sebanyak 25%, usia dan usia antara 18-28 sebanyak 15%

**Tabel 2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA/SMK	10	25.0
DIPLOMA	12	30.0
S1	15	37.5
S2	3	7.5
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100.0</b>

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar

responden yang diteliti mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 37,5%. Pendidikan terakhir Sarjana (S2) sebanyak 7,5%, pendidikan terakhir Diploma sebanyak 30%, dan pegawai yang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 25%. bahwa sebagian besar responden yang diteliti mayoritas memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 75% dan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 25%

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
< 5 tahun	10	25.0
> 5 tahun	30	75.0
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pengujian regresi linier berganda tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 Analisis regresi berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	6.474	3.445		1.879	.068			
SPIP	.301	.099	.394	3.045	.004	.489	.453	.385
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.354	.161	.317	2.196	.035	.492	.344	.277
Kompetensi SDM	.186	.135	.196	1.377	.177	.394	.224	.174

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan  
Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut :  
 $Y = 6,474 + 0,301.X_1 + 0,354.X_2 + 0,186.X_3 + e$

Koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *R square*, yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.652 <sup>a</sup>	.426	.378	1.23427

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, SPIP, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Nilai *R Square* sebesar 0.426 atau 42,6%, ini menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh sistem pengendalian intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi



informasi, dan kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 42,6%, sedangkan sisanya sebesar 57,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

#### 1. Hipotesis Pertama

Diketahui nilai  $t$  hitung variabel sistem pengendalian intern pemerintahan ( $X_1$ ) adalah sebesar 3,045, hasil ini lebih besar dibandingkan dengan  $t$ -tabel sebesar 1,663. Dengan demikian sistem pengendalian intern pemerintahan mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan probabilitas tingkat kesalahan variabel sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Artinya, sistem pengendalian intern pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Ajhar, dkk (2015), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Yensi. dkk (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan bahwa masing-masing pemerintah daerah mempunyai kebijakan tersendiri mengenai sistem pengendalian intern sehingga terjadi perbedaan hasil penelitian, selain itu objek dan sasaran responden yang dijadikan sampel juga berbeda.

#### 2. Hipotesis Kedua

Diketahui nilai  $t$  hitung variabel teknologi informasi ( $X_2$ ) adalah sebesar 2,196, hasil ini lebih besar dibandingkan dengan  $t$ -tabel sebesar 1,663. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan probabilitas tingkat

kesalahan variabel sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Ajhar, dkk (2015), menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

#### 3. Hipotesis Ketiga

Diketahui nilai  $t$  hitung variabel kompetensi sumber daya manusia ( $X_3$ ) adalah sebesar 1,377, hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan  $t$ -tabel sebesar 1,663. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan probabilitas tingkat kesalahan variabel sebesar 0,177 lebih besar dari 0,05. Artinya, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Hal ini dimungkinkan terjadi dimana meskipun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin sebagian besar sumber daya manusia yang memproses informasi laporan keuangan berstatus pegawai kontrak dengan latar pendidikan dan kompetensi yang beragam, tetapi proses akuntansi hingga pembuatan laporan keuangan telah dilakukan secara komputerisasi menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan pegawai yang bersangkutan juga telah diberikan pelatihan kerja dalam pengoperasian sistem informasi keuangan tersebut, sehingga dapat meminimalisis kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil analisis menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian Wijayanti (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi kompetensi sumberdaya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pujanira dan Taman (2017), (Andini dan Yusrawati. (2015) yang menemukan pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan.

#### 4. Hipotesis Keempat

Hasil analisis regresi linier berganda bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas

informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini terbukti bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $F_{hitung} 8,896 > F_{tabel} 2,479$ ), berarti sistem pengendalian intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

Hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas informasi laporan keuangan.

### **Kesimpulan**

1. Hasil analisis menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
2. Hasil analisis menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
3. Hasil analisis menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
4. Hasil analisis menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

### Saran

1. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah yang melibatkan seluruh satuan perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam rangka mendukung kualitas informasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, audit, reviu dan evaluasi program dan kegiatan serta pertanggungjawabannya.
2. Pemanfaatan teknologi informasi agar lebih dioptimalkan dengan cara menyiapkan, membangun dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang handal dan baik serta berkualitas serta membuat pedoman pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pemanfaatan teknologi informasi yang optimal perlu adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan pemanfaatan teknologi dan penyamaan persepsi berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, kemudahan penggunaan teknologi informasi serta kesesuaian dengan bidang tugas masing-masing pengguna teknologi informasi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus mampu menjawab tantangan dan permasalahan-permasalahan dalam hal akuntabilitas yang sekarang menjadi suatu tuntutan masyarakat luas.
3. Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, meskipun hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas

informasi laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin tetapi diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Tapin tetap dapat menempatkan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan keahliannya masing-masing (the right man on the right place), (the man behind the gun), meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, melakukan pemetaan dan penataan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan bidangnya, penilaian kinerja yang objektif, memberikan apresiasi dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dengan tujuan untuk memacu kinerja dengan demikian diharapkan kualitas informasi laporan keuangan dapat terlaksana dengan baik.

4. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel lainnya seperti kompensasi, sanksi dan penghargaan, serta pola karir dan budaya organisasi.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Faisal. 2013. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Cetakan Keempat*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- Ajhar, Akram, dan Endar Pituringsih, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis AkruaI dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)*. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 62–73.
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2015. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat, Jakarta.

- Asrida. 2012. *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen*. Jurnal Kebangsaan. 1(1). 29- 40
- Arsyati. 2008. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Pnbp Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Universitas Syiah Kuala*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 1. Universitas Syiah Kuala.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Azmi, Maulidiyah Nur & Agung Listiadi. 2014. *Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Ios Terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 No.3.
- Bastian, Indra, 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit PT Erlangga, Jakarta.
- Belkaoui, Riahi Ahmed. 2010. *Teori Akuntansi Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2014, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Dewi, Andini dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Ghozali, Imam, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Kristiadi, J.B, 1996, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, LAN, Jakarta
- Kusnadi, dkk, 2010. *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*, Edisi Kedua, Penerbit Unibraw Malang.
- Kusuma, Laras Pratiwi. 2018. *Pengaruh Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, dan Insentif Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dengan Motivasi sebagai Variabel Pemoderasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Lalolo, Loina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Makalah.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Maksyur, Noprial Valenra. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem*

- Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. JOM FEKON Vol. 2 No. 2.
- Nordiawan, Deddi, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nugraheta, Ulfa Rima. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi empiris pada Dinas SKPD Kota Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nurillah. As Syifa dan Dul Muid. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014, ISSN (Online): 2337-3806
- Pamungkas, B. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading 12 (2):82-93.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permana, Asep Yogi. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Cimahi)*. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Komputer Indonesia
- Priyatno, Dwi. 2015. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom
- Putra dan Ariyanto. 2015. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13, No. 01.
- Purnama Sari, Astuti 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Dan Kabupaten*. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah*. Surakarta
- Sugiyono, 2015. *Statistik untuk Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Vina, Novita. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas- Teknologi dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Sistem Informasi yang baru Terhadap Kinerja Akuntan*. *Jurnal*, Universitas Riau: Pekanbaru
- Wati. Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati. 2014.

*Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.* e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)

Wilkinson, Josep W. Et al, 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application*. 4 Edition, John Willey & Sons Inc, New York-USA

Winidyaningrum, Celvina, dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. *Simposium Nasional Akuntansi XII*, Purwokerto.

Yensi. Desy Sefri, Amir Hasan, Yuneita Anisma. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Intern Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)*. JOM FEKON Vol. 1 No. Oktober 2014.